

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of Langowan Barat District, Minahasa Regency

Praisya Mumu, Lintje Kalangi, Peter M. Kapojos

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : praisyamumu@gmail.com ; lintje_kalangi@yahoo.com ; peterkapojos@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan faktor penting untuk menyusun laporan keuangan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekskriptif yaitu dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Langowan Barat sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya telah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yaitu dengan penyajian laporan realisasi anggaran belanja, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas berbasis akrual. Namun masih ada pos yang kurang pada laporan realisasi anggaran yaitu pos transfer dan pembiayaan agar lengkap dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Kata kunci: penerapan standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, laporan keuangan

ABSTRACT

The application of Government Accounting Standards is an important factor for preparing appropriate financial statements. The purpose of this study was to analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in Regional Financial Reports, Langowan Barat District, Minahasa Regency. The data analysis method used is descriptive qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the District of West Langowan as one of the reporting entities, in presenting its financial statements based on PP No. 71 of 2010 concerning government accounting standards, namely by presenting reports on the realization of the budget, balance sheets, operational reports and reports on changes in accrual-based equity. However, there are still items that are lacking in the budget realization report, namely transfer and financing posts so that they are complete and in accordance with PP No. 71 of 2010.

Keywords : application of government accounting standards, accrual basis, financial statements

1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masyarakat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD), dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Akuntansi Pemerintah (PSAP), Disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang Independent dn ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan BPK.

Laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK;

2010) Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dikembangkan suatu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Pemerintah. Karena keterkaitan antara bidang akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah sebagai pengelola keuangan masyarakat dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang tepat akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah juga bagi pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.

Menurut Nordiawan (2016: 25) Tujuan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah, sehingga informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu wujud konkrit untuk mewujudkan transparansi pengelolaan laporan keuangan negara adalah diundangkannya Undang - Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tersebut pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010, menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrua. Walaupun sudah dinyatakan tidak berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan paling lambat paling lambat sampai tahun 2014 karena pada tahun 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menggunakan PP No. 71 tahun 2010. Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrua akan menjadi lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa Layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan.

Terkait dengan implementasi basis akrua sendiri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga beserta Pemerintah kota dan Pemerintah Kabupaten sendiri termasuk Pemkab Minahasa melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan laporan keuangan berbasis akrua. Salah satu bukti pada penerapannya adalah pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP berbasis akrua untuk Tahun 2014 dan 2015 (sampai dengan Triwulan ke-III), pada Pemprov Sulut, Pemkot Bitung, Pemkot Tomohon, dan Pemkab Minahasa Utara (Minut) pada bulan November tahun 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan penulis tuangkan dalam laporan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”**.

Menurut Weygant (2018:139) yang diterjemahkan oleh Derry Purwasari menyatakan akuntansi adalah pengidentifikasian pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang intensitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Purwosetiono (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2016:01) Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, yaitu dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan (Halim, 2018:12); Berbeda dengan akuntansi bisnis ; Tidak ada laporan laba ; Anggaran merupakan plafond ; Menggunakan lebih dari satu dana ;

Sangat bergantung pada undang-undang ; dan Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca

Menurut Hendri (2020:8), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pmda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur oleh (PP No 12 Tahun 2019). Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

1. SAP Berbasis Kas

Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2. SAP berbasis Akrual

SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Menurut Karakteristik Mahmudi (2016:271) akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
3. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
4. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah di kabupaten Minahasa, siklus tersebut yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah yang baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada suatu entitas pelaporan, guna membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah khususnya Kecamatan Langowan Barat kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya.

Penelitian Terdahulu

1. Dimas (2016) dalam penelitian yang berjudul Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian Implementasi SAP berbasis akrual yang dilakukan masih memiliki kendala yaitu belum sepenuhnya relevan, mutakhir, SDM pengelola keuangan yang belum memiliki kompetensi bersyarat, dan dalam segi teknologi informasi aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi secara vertical dan horizontal.
2. Agnes (2016) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan PEMDA Provinsi NTT Hasil penelitian menunjukkan Pemprov NTT masih mengalami banyak hambatan dalam proses penerapan SAP Berbasis Akrual. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan PPK, kurangnya pemahaman pengelola keuangan terhadap basis akrual, serta koordinasi pengelolaan aset dengan Dispenda yang masih belum berjalan.
3. Saprudin (2017) dalam penelitian yang berjudul Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dari hasil penelitian Berdasarkan uji parsial dan uji simultan keduanya berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal itu ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi, yaitu dengan nilai R square sebesar 0,289. Yang memperlihatkan bahwa 28,9% penerapan SAP basis akrual dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sedangkan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
4. Alfonsus (2018) dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah Hasil penelitian menunjukkan Kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pada pemerintah daerah kabupaten manggarai belum siap. Komitmen organisasi memiliki kontribusi yang paling berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
5. Jumania (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis dampak penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil penelitian menunjukkan Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai asset dan penyusutan asset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis, menggambarkan, mengevaluasi dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan lewat hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan dimana penulis akan mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Waktu Penelitian yaitu bulan September sampai dengan Bulan Oktober 2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan hasil wawancara kepada pihak pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara untuk mendapatkan data yang objektif. Dan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan atau bersangkutan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, ialah untuk menggambarkan keadaan nyata pada suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang didasarkan pada landasan teoritis yang telah disusun.

Proses Analisis

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terlihat dari catatan-catatan tertulis di lapangan (written- up field notes). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data.

Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai Tak Langsung	1.588.464.814,20	1.418.520.034,00	169.944.780,20
2. Belanja Pegawai Langsung	104.315.000	104.275.000	40.000
3. Belanja Barang & Jasa	660.094.600	658.476.293	1.618.307
4. Belanja Modal	99.580.400	99.580.000	400
Jumlah :	2.452.454.814,20	2.280.851.327	171.603.487,20

Sumber : Kecamatan Langowan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun anggaran 2019 menunjukkan bahwa anggaran belanja Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berasal dari Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp.2.452.454.814,20 realisasinya mencapai Rp 2.280.851.327,00 Saldo anggaran Rp. 171.603.487,20.

Analisis Penyajian Neraca Kecamatan Langowan Barat Tahun 2019

Tabel 2. Neraca Tahun Anggaran 2019

URAIAN	2019
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	0,00
Kas lainnya	0,00
Setara Kas	0,00
Investasi jangka pendek	0,00
Piutang pendapatan	0,00
Piutang lainnya	0,00
Beban dibayar dimuka	0,00
Persediaan	1.920.800,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.920.800,00

URAIAN	2019
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi jangka panjang Non Permanen	0,00
Investasi jangka panjang kepada Entitas lainnya	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Dana Bergulir	0,00
Deposito jangka panjang	0,00
Investasi Nono Permanen lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Investasi Permanen lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00
ASET TETAP	
Tanah	0,00
Peralatan dan Mesin	639.096.105,00
Gedung dan Bangunan	655.163.000,00
Jalan, irigasi dan jaringan	2.500.000,00
Aset tetap lainnya	1.075.333,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	(634.388.608),00
JUMLAH ASET TETAP	663.445.830,00
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
ASET LAINNYA	
Tagihan jangka Panjang	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	27.000.000,00
Aset lain-lain	0,00
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	0,00
Aset lain yang Dana Bos	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.800.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	16.200.000,00
JUMLAH ASET	681.556.630,00
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Bunga	0,00
Bagian Lancar utang jangka panjang	0,00
Pendapatan Diterima dimuka	0,00
Utang beban	2.587.552,00
Utang jangka pendek lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.587.552,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	0,00
Utang jangka panjang lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN	2.587.552,00
EKUITAS	

URAIAN	2019
EKUITAS	678.979.078,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	681.566.630,00

Sumber : Kecamatan Langowan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 2. maka penjelasan dan perincian pos-pos neraca adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar
Jumlah saldo persediaan akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.920.800,- terdiri dari persediaan barang habis pakai berupa ATK yang masih tersisa per 31 Desember 2019.
2. Investasi Jangka Panjang
Nilai Investasi Jangka panjang adalah nihil.
3. Aset Tetap
Pada Neraca Kecamatan Langowan Barat sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan Mesin : Rp 639.096.105,00
 - b. Gedung dan Bangunan : Rp 655.163.000,00
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 2.500.000,00
 - d. Aset Tetap Lainnya : Rp 1.075.333,32
 - e. Penyusutan : Rp 634.388.607,86
 - f. Jumlah per 31-12-2019 : Rp 2.342.189.819,46
4. Dana Cadangan Nilai Dana Cadangan nihil
5. Aset Lainnya
 - a. Aset Tidak Berwujud : Rp 27.000.000,-
 - b. Amortisasi Aset Tak Berwujud : Rp 10.800.000,-
 - c. Jumlah per 31-12-2019 : Rp 16.200.000,-
6. Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek Utang beban berasal dari hutang Listrik dan Telepon untuk penggunaan bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2020. Dalam Neraca tertulis sebesar Rp.2.587.552,00.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Nilai Kewajiban jangka panjang adalah nihil
7. Ekuitas
Nilai Ekuitas berasal dari Aset dikurangi Kewajiban, sehingga:
 - a. Aset : Rp.681.556.630,-
 - b. Kewajiban : Rp. 2.587.552,-
 - c. Ekuitas : Rp.678.979.078,-
8. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
Dengan demikian Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana tahun 2019 sebesar Rp.681.556.630,-, jumlah tersebut terdiri dari :
 - a. Kewajiban Jangka Pendek : Rp 2.587.552,-
 - b. Ekuitas : Rp 678.979.078,-

Analisis Penyajian Laporan Operasional Tahun 2019 Kecamatan Langowan Barat

Tabel 3. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Saldo
	Kegiatan Operasional	
1	Pendapatan – LO	0
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0
	Pendapatan Transfer – LO	0
	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0
2	Beban	(2.280.851.327)
	Beban Pegawai – LO	1,622,375,034
	Beban Barang Dan Jasa	658.476.293
	Surplus/Defisit dari Operasi	(2.280.851.327)

Kegiatan Non Operasional	
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	0
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(2.280.851.327)
Pos Luar Biasa	
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
Surplus/Defisit - LO	(2.280.851.327)

Sumber : Kecamatan Langowan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 3. Laporan Operasional tahun anggaran 2019 kegiatan operasional akun pendapatan LO sebesar Rp.0 sedangkan jumlah akun beban sebesar Rp. 2.280.851.327. Sehingga surplus/defisit dari kegiatan operasional Rp. 2.280.851.327. Pada kegiatan non operasional dan pos luar biasa jumlah surplus/defisit sebesar Rp. 0. Sehingga pada anggaran 2019 entitas mengalami surplus/defisit-LO sebesar Rp. 2.280.851.327.

Analisis Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 Kecamatan Langowan Barat

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019

Uraian	Saldo
Ekuitas Awal	8.688.668.096
Surplus/Defisit dari Operasi	(2.280.851.327)
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	4.200.466.891
Ekuitas Akhir	9,608,283,660

Sumber : Kecamatan Langowan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 4. laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.688.668.096 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar Rp. 2.280.851.327 lalu dijumlahkan dengan kewajiban dikonsolidasikan sebesar Rp. 7.200.466.891 sehingga ekuitas akhir pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9,608,283,660.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Penyajian laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Langowan Barat telah memuat unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Selanjutnya penyajian neraca oleh Kecamatan Langowan Barat telah menyajikan informasi asset, kewajiban dan ekuitas pada akhir tahun anggaran 2019. Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dan telah mengklasifikasikan kewajiban dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayaran. Dalam neraca Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa telah membandingkan antara neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang sebelumnya. Penyajian laporan operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Langowan Barat menunjukkan bahwa laporan operasional telah menyajikan unsur – unsur yaitu pendapatan – LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit dari pos luar biasa dan surplus/defisit-LO. Selanjutnya penyajian laporan perubahan ekuitas menunjukkan bahwa laporan perubahan ekuitas pada Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa telah memuat unsur ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Selanjutnya penyajian Catatan atas Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa telah menyajikan tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Pemerintah Kecamatan Langowan Barat menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas telah disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Menurut Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kecamatan Langowan Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 namun masih ada pos yang kurang pada laporan realisasi anggaran yaitu pos transfer dan pembiayaan agar lengkap dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Jumania (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis dampak penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil penelitian menunjukkan Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan oprasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai asset dan penyusutan asset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya, yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 walaupun masih ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Namun bertentangan dengan hasil penelitian Langelo, Saerang dan Alexander (2016) yang menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kota Bitung, dimana hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan kesimpulan yaitu Kecamatan Langowan Barat sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya telah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yaitu dengan penyajian laporan realisasi anggaran belanja, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas berbasis akrual. Namun masih ada pos yang kurang pada laporan realisasi anggaran yaitu pos transfer dan pembiayaan agar lengkap dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepala bagian pengeluaran pada Kecamatan Langowan Barat sebaiknya melengkapi pos – pos pada laporan realisasi anggaran agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dan semakin mempertahankan transparansi serta akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan
2. Kualitas sumber daya manusia Kecamatan Langowan Barat sebaiknya ditingkatkan agar mempunyai kemampuan dalam rangka penyajian laporan keuangan dengan memberikan kualifikasi dalam proses penerimaan pegawai dibidang akuntansi dan menyelenggarakan atau

mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, D. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan PEMDA Provinsi NTT. *Skripsi*. STIE Perbanas. Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/3018/> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Alfonsus, I.W. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 13, No.1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11172/10706> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Dimas, M.S., Yuhertiana, I., Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 18, No. 1. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/download/oaid/19866/19074> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Halim, A. (2018). *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hendri, W., Mariati, M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Banteng. *Accounting Journal*, 1(4), 78-85
- Jumania, S. (2018). Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah (JIAR)* Vol 2 No 1 (2018). <http://jurnal.stier.ac.id/index.php/ak/article/view/62>
- Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S. W. Alexander. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Mahmudi. (2016). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Nordiawan, D., Ayuningtyas., Hertianti. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2010 Nomor 21. 2011. *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri*. Nomor 13 Tahun. 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Purwosetiono, W.S. (2018). *Ekologi Pemerintahan*, Jakarta, PT. Pertja
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Saprudin, S. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo). *Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.5 No.2 <https://www.researchgate.net/publication/326162975/download> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Weygandt, J.J., Kieso, D.E., Warfield, T.D. (2018) *Intermediate Accounting*. Edisi Ke-12. Jakarta: Erlangga.